

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi penelitian

A. Kabupaten Bandung

Kabupaten Bandung merupakan salah satu dari 26 kabupaten/kota yang berada dalam wilayah Provinsi Jawa Barat. Sebelum dipecah menjadi dua daerah otonom yakni Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat, kabupaten ini termasuk daerah yang memiliki wilayah luas dan penduduk yang sangat banyak. Data mengenai jumlah penduduk dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung
Tahun 2006 s/d Tahun 2010 (Dalam Jiwa)

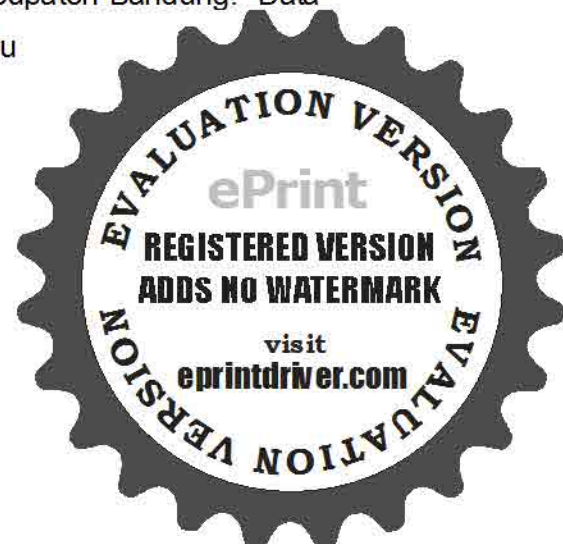
No.	Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Seluruhnya
1.	2006	1.395.834	1.346.964	2.742.798
2.	2007	1.407.950	1.345.757	2.753.707
3.	2008	1.622.302	1.529.135	3.151.437
4.	2009	1.714.327	1.615.331	3.329.658
5.	2010	1.727.123	1.627.480	3.353.603

Sumber Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung.

Jumlah penduduk di Kabupaten Bandung yang banyak secara langsung maupun tidak langsung memungkinkan terjadinya berbagai masalah sosial, ideologi dan politik, ekonomi maupun masalah komprehensif yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah maupun instansi vertikal yang ada di Kabupaten Bandung. Data konflik sosial yang terjadi antara tahun 2006 sampai tahun berikut :¹

- a. Tahun 2006 : 27 kasus
- b. Tahun 2007 : 20 kasus
- c. Tahun 2008 : 39 kasus
- d. Tahun 2009 : 31 kasus
- e. Tahun 2010 : 9 kasus.

¹ Data bersumber dari Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Bandung.



Berdasarkan data di atas dapat diperoleh gambaran bahwa konflik sosial di Kabupaten dari tahun ke tahun bersifat fluktuatif. Konflik sosial yang ada umumnya berupa pertengkaran antara kelompok masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya, yang biasanya disebabkan oleh faktor ekonomi, antara lain rebutan tempat berdagang di kaki lima. Konflik sosial yang agak besar antara lain adanya keberatan salah satu kelompok agama tertentu terhadap kegiatan beribadah agama lain, karena dianggap beribadah bukan pada tempatnya. Muspida dalam hal ini harus mengambil sikap secara cepat dan tegas agar tidak meluas menjadi konflik SARA, yang pada gilirannya dapat mengganggu situasi dan kondisi daerah yang kondusif.

Selain konflik sosial sebagaimana datanya dikemukakan di atas, pada tahun 2006 sampai tahun 2010 terdapat konflik politik dengan data sebagai berikut²:

- a. Tahun 2006 : 1 kasus;
- b. Tahun 2007 : tidak ada kasus;
- c. Tahun 2008 : 6 kasus;
- d. Tahun 2009 : 9 kasus;
- e. Tahun 2010 : 11 kasus.

Berbeda dengan konflik sosial yang bersifat fluktuatif, konflik politik memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun, dan mencapai puncaknya pada tahun 2010. Hal ini berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan Bupati Bandung periode 2010-2015. Biasanya setelah bupati terpilih dan dilantik secara definitive, konflik politik akan cenderung menurun. Forum Muspida menjadi sangat penting untuk mencegah agar konflik politik yang ada tidak meluas.

B. Kota Bandung

Kota Bandung merupakan salah satu kota besar di Indonesia, yang dapat disejajarkan dengan Kota Surabaya, Medan, Makassar, dan Semarang. Di Kota ini terdapat 30 lingkungan kerja kecamatan, yang menurut data penduduk tahun 2004 jumlah penduduknya sebanyak 2.510.982 jiwa.³ Pada tahun 2010 jumlah penduduknya sebanyak 2.340.624 jiwa. Sebagai pusat kegiatan penting, maka di sekitar Kota Bandung berkembang daerah-daerah *hinterland* seperti Kabupaten Bandung Barat, wilayah Kabupaten Sumedang bagian barat serta Kota Cimahi.

² Sumber Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bandung.

³ Lihat kotabandung.go.id.

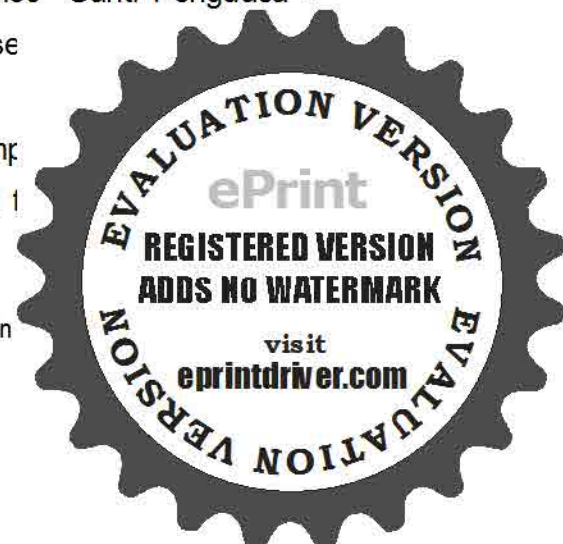


oleh penduduk yang berjumlah besar pula. Kabupaten Bandung, Bandung Barat dan Kota Cimahi pada tahun 2006 dapat mencapai jumlah penduduk lima jutaan. Dengan peran sebagai orientasi, maka pergerakan penduduk antara pusat dan *hinterland* menjadi bercampur, sehingga realitas jumlah penduduk yang beraktivitas di Kota Bandung cenderung melebihi jumlah penduduk yang teregistrasi. Rata-rata pertumbuhan jumlah penduduk Kota Bandung antara tahun 2002-2007 adalah sebesar 1,43%. Dengan kondisi tersebut, maka diperkirakan pada tahun 2013, jumlah penduduk Kota Bandung mencapai hampir 2,6 juta jiwa. Pertambahan jumlah penduduk ini dapat menjadi beban berat apabila secara bersamaan daerah sekitarnya juga terus mengalami pertumbuhan penduduk. Bila biaya hidup dan beraktivitas di Kota Bandung semakin kompetitif dan mahal, pertumbuhan penduduk dapat semakin melambat, hingga mencapai 2,4 juta jiwa.⁴ Jumlah ini tetap mengisyaratkan Kota Bandung sebagai kota penting, namun penduduk yang beraktivitas didalamnya melakukan komuter dan tinggal di daerah sekitar Kota Bandung. Dalam kondisi ini tetap saja beban bayangan jumlah penduduk yang besar, menjadi isu penting Kota Bandung di masa datang.

Kota Bandung sebagai ibukota Provinsi Jawa Barat dengan berbagai fungsi kota seperti kota pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat perbelanjaan, pusat seni dan budaya, pusat hiburan dan lain sebagainya menjadikannya kota yang rawan konflik. Kebijakan dekonsentrasi planologis yang dikembangkan pada masa orde baru dengan cara memindahkan berbagai fungsi yang diemban Kota Bandung ke luar kota tidak berjalan secara konsisten. Sebagai salah satu contoh, pemindahan pusat pendidikan dari Kota Bandung ke Kota Jatinangor di Sumedang tidak berjalan seperti yang direncanakan. Begitu terjadi pergantian rejim pemerintahan di Kota Bandung maupun Provinsi Jawa Barat, maka rencana yang sudah disusun secara ilmiah dengan biaya yang cukup besar ditinggalkan. Pemeo “Ganti Penguasa – Ganti Kebijakan” membuat perkembangan Kota Bandung se jelas.

Melihat masalah Kota Bandung yang sedemikian kompleks dengan semua para pemangku kepentingan melalui sebuah t sangat penting.

⁴Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun



4.2. Gambaran Umum Informan

A. Kabupaten Bandung

Semula, informan utama dalam penelitian ini adalah Bupati Bandung sebagai pembuat kebijakan daerah serta koordinator forum Muspida, tetapi karena yang bersangkutan belum lama menduduki jabatan tersebut sehingga perlu terlebih dahulu mempelajari seluk beluk Muspida, kemudian member disposisi kepada Sekretaris Daerah untuk menjelaskan. Karena kesibukan kedua pejabat dalam penutupan APBD tahun anggaran 2010 dan penyusunan APBD Tahun 2011, informan kuncinya bergeser pada pejabat lainnya yakni Asisten I Sekda yang membidangi pemerintahan. Data informan di Kabupaten Bandung secara lengkap dapat dilihat pada tabel 4.1. berikut ini

Tabel 4.1. Daftar Nama Informan di Kabupaten Bandung

Nomor	Nama Pejabat	Jabatan
1.	H. Yudi Haryanto, SH, SP.I	Asisten I Sekda Kab. Bandung
2.	Letkol. Arnold Ritiaw	Dandim 0609 Bandung
3.	AKBP. Hendro Pandowo	Kapolres Kab. Bandung
4.	Yuqiyayum	Kepala Kejaksaan Negeri Bandung
5.	Drs. Sutarno Yono SR. M.Si	Kepala Kesbangpol Kab. Bandung
6.	Sandy, S.Stp.	Kasub Bag Pemerintahan Umum Setda Kab. Bandung.

Dari daftar informan di atas, tidak ada yang berasal dari pimpinan DPRD. Peneliti beranggapan bahwa kebijakan tentang Muspida ataupun FKPD lebih banyak diambil oleh kepala daerah, sehingga informasi tentang hal tersebut cukup diperoleh dari jajaran eksekutif saja.

Para informan dari Kabupaten Bandung umumnya keberadaan forum Muspida sangat penting dan perlu dipertahankan. Ditemui dalam menyelenggarakan forum Muspida adalah ada skala prioritas yang berbeda dari masing-masing anggota, masing-masing tetap saling membutuhkan dan dapat diselaraskan dengan bijaksana.



Frekuensi kegiatan rapat Muspida di Kabupaten Bandung minimal sebanyak 12 (duabelas) kali dalam setahun yang dilaksanakan melalui kegiatan Forum Komunikasi Ulama dan Umaro (FKUU) Kabupaten Bandung yang dilaksanakan setiap bulan sekali. Kegiatan FKUU dimaksud diadakan dalam rangka *sharing* dan *hearing* antara masyarakat (diwakili tokoh masyarakat dari tiap desa), para ulama, dan penyelenggara pemerintahan (diantaranya dari unsur MUSPIDA). Kegiatan lain yang melibatkan unsur MUSPIDA adalah rapat-rapat persiapan hari-hari besar nasional (termasuk persiapan HUT RI, Hari Pahlawan) HUT Kabupaten Bandung dan atau hari besar keagamaan (PAM Lebaran, Natal dan Tahun baru). Selain itu adapula rapat penanggulangan bencana (banjir, gempa, angin puting beliung) dan kejadian luar biasa lainnya (seperti PEMILUKADA, antisipasi Geng Motor, dan lain sebagainya).

Melihat cakupan materi yang dikordinasikan melalui forum Muspida di Kabupaten Bandung, dapat diperoleh gambaran bahwa forum ini memang sangat penting, terutama untuk mensinkronkan berbagai aktivitas antar dan antara instansi pemerintah maupun dengan masyarakat yang berhimpitan.

Rapat Muspida biasanya dipimpin langsung oleh Bupati, yang diselenggarakan dalam suasana kekeluargaan, serta dengan menjaga dan meningkatkan saling pengertian antara segenap peserta. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, tidak dilakukan dengan model pemungutan suara. Pangkal tolak musyawarah adalah persatuan dan kebulatan untuk memecahkan segala persoalan yang timbul dalam menyelenggarakan tugas Pemerintahan Daerah dengan selalu mengutamakan bidangnya masing-masing;

Bupati dalam memimpin musyawarah menempuh segala kebijaksanaan untuk dapat mencapai pemupakatan dan kebulatan pendapat musyawarah dalam Musyawarah Pimpinan Daerah menjad jawab instansi yang bersangkutan sesuai dengan bidang tu kegiatan rapat Muspida adalah dalam bentuk tindakar mengintegrasikan, mensinkronisasikan pelaksanaan tugas ap daerah, dan melakukan penilaian intensitas dan ekstensitas g



